

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah**
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan
DIY)

Ramadha Puspita Sari
Universitas PGRI Yogyakarta
Ipoet_madha@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan DIY. Penelitian ini adalah 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dan 5 kabupaten / kota di DIY. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil pada tahun 2010 sampai 2013.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dokumen / Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang diperoleh dari (www.djpk.depkeu.go.id). Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Data tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik regresi linier dengan bantuan SPSS 21.

Hasil pengujian penelitian dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah yang telah membawa perubahan cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah. Diharapkan melalui kebijakan yang sudah berjalan beberapa tahun ini dapat membantu proses reformasi pada tingkat lokal dan memberi kebebasan terutama pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber – sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal sehingga tercipta pembangunan yang baru. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan lebih baik lagi pemerintah lokal dapat lebih fokus menjalankan pemerintahannya untuk memajukan sarana, infrastruktur bahkan sumber daya alam dan manusia sekalipun lewat kebijakan otonomi daerah ini.

Dengan adanya otonomi daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada pada tangan daerah itu sendiri dan dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.

Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintahan Daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana

tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

UU No.23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, suatu daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri, karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Besar kecilnya hasil PAD paling tidak dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada peningkatan kadar otonomi daerah tersebut.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan atas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan atas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak, retribusi.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Belanja daerah dibagi dalam dua klasifikasi yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang telah dianggarkan.

Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan menggunakan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan data yang digunakan dalam penelitian merupakan sampel data dari Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Sehingga diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif. Oleh karena itu penulis mengajukan judul : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun 2010-2013)”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY ?

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY?

KERANGKA TEORI

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), Syukriy & Halim (2003) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi Anggaran Belanja Alokasi Belanja Tidak Langsung Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Colombatto (2001) dalam Syukriy dan Halim (2003) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang

berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebutlah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung, karena belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja tidak terduga. Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari PAD mengalami penambahan karena alokasi belanja tidak langsung cenderung digunakan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tiap tahun terjadi kenaikan gaji pegawai, dibanding untuk pengalokasian belanja tidak langsung lainnya. Dengan adanya kenaikan belanja pegawai mengorbankan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah didalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk

membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara luas dapat menggunakan dana ini untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh *grants* dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004). Holtz-Eakin *et al* (1985) dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Puspita Sari, 2009).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada

masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja tidak tersangka. Setiap tahun terjadi peningkatan belanja tidak langsung disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terlalu signifikan, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji pegawai tersebut. Namun didorong kewajiban untuk mengalokasikan belanja hibah sebagai komponen belanja tidak langsung. Sehingga DAU memiliki pengaruh terhadap belanja tidak langsung.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)

Penelitian Situngkir (2009) menemukan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil dari penelitian Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional. Menurut Ahmad Subekan (2012), DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)

Nugraeni (2011) menyatakan bahwa DAU, DAK dan PAD berasosiasi dengan Belanja Daerah. Hasil ini membuktikan bahwa DAU, DAK dan PAD merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

HIPOTESIS

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja Daerah.

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja Daerah.

H3 :Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data sekunder dari website dinas perimbangan (<http://djpk.depkeu.go.id>) dengan menggunakan variabel Independen adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Sebagai variabel Dependen.

B. Metode Penentuan Subjek

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan berjumlah 5 Kabupaten/Kota di DIY pada Tahun 2010 sampai 2013 dengan alasan ketersediaan data. Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 hingga 2013.
- b. Kabupaten/kota mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan alokasi belanja daerah pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini.

Jumlah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 hingga 2013 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 35 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan berjumlah 5 Kabupaten/Kota di DIY. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010-2013 dengan data penelitian sebanyak 160 daerah, dimana jumlah tersebut

diperoleh dengan rumus:

$N = \text{jumlah daerah} \times \text{periode penelitian}$

$N = 40 \times 4 \text{ tahun}$

$N = 160$

C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode

sensus dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 40 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti di berlakukandengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 21.00 for windows yang terdiri dari:

1. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho, 2005). Selain itu deteksi terhadap multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Tolerance* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan

nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005).

c. Uji Autokorelasi

Uji *Autokorelasi* bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi dalam hal variabel independen. Uji *Autokorelasi* dapat dilakukan dengan cara uji *Durbin Watson (DW test)*. Adapun cara mendeteksi terjadinya *Autokorelasi* secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut :

- a. Angka DW di bawah -4 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka DW diantara -4 sampai +4 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka DW di atas +4 berarti ada autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan pelanggaran dari asumsi *homoskedastisitas* yang dapat menyebabkan bias dalam perhitungan koefisien parameter. *Heteroskedastisitas* berarti variabel-variabel penjelas dalam persamaan regresi memiliki varians error yang tidak konstan, sehingga mengakibatkan estimator menjadi tidak efisien (baik pada sampel ukuran kecil atau ukuran besar). Kondisi ini sering muncul dari data *time series* (data yang dikumpulkan dari satu individu dan banyak waktu).

Pengujian situasi *Heteroskedastisitas* dilakukan dengan pendekatan grafik dan uji statistik. Deteksi melalui grafik dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik tertentu, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y- Prediksi-Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan Gujarati (2003:402) :

- a) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terdapat situasi *heteroskedastis*.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi situasi *heteroskedastis*.

3. Metode Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1$$

dimana :

Y1 = Belanja Daerah (BD)

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep
PAD = Pendapatan Asli Daerah
(PAD) DAU = Dana Alokasi Umum (DAU) DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Pengujian hipotesis akan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=0,05$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi tersebut umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti.

Hipotesis yang akan diuji berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel yang diteliti. Hipotesis Nol (H_0) adalah hipotesis yang akan diuji sedangkan hipotesis Alternatif (H_a) merupakan hipotesis pembanding dari hipotesis Nol. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis akan dilakukan secara parsial dan secara simultan. Komposisi perumusan hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis Pertama:

H1=Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Hipotesis Kedua:

H2 = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Hipotesis Ketiga:

H3 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Selanjutnya untuk pengujian masing-masing hipotesis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. uji hipotesis parsial yaitu dengan menggunakan rumus :

Dimana :

t = Nilai uji t

r = Koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

Kriteria uji t adalah :

1. Jika t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima (variabel bebas X berpengaruh terhadap variabel terikat Y).
2. Jika t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak (variabel bebas X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y).

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara simultan atau bersamasama ketentuannya yaitu jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Sebelum menghitung nilai F statistik maka terlebih dahulu harus menghitung nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat regresi (ESS) dengan jumlah kuadrat total (TS) nilai R^2 ini selanjutnya akan digunakan dalam menguji kedekatan variabel bebas dan variabel terikat Uji F hitung atau f statistik dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$UjiF = \frac{r^2}{(1 - r^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana :

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

R^2 = Koefisien korelasi yang telah ditentukan

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

3. Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen.

Dari ini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Rumus yang digunakan yaitu :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = Koefisien determinasi

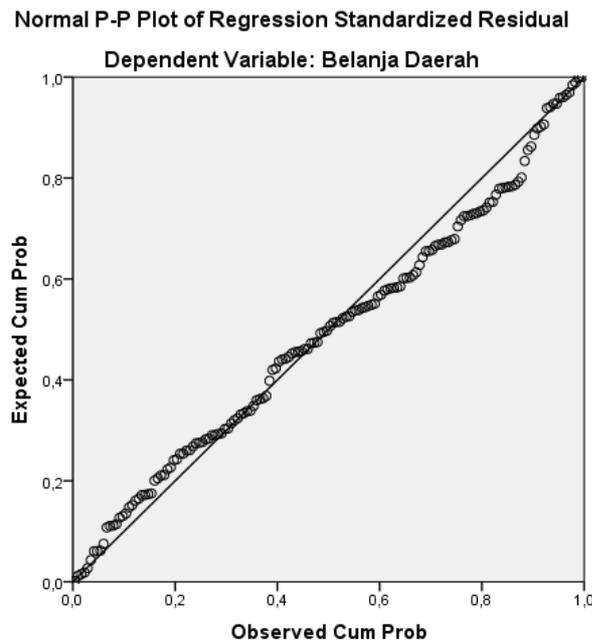
r^2 = Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keterangan grafik di bawah, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sample tesKolmogrov-Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebihdetail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006).

Normal Probability Plot



Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,255. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,255 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal.Lihat table bawahini

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	,255

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel di bawah terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD dan DAU memiliki angka *Variance Inflation Factors*(VIF) di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.Lihat table bawahini

Tabel Hasil Uji Multikolonearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	,687	1,455	Tidak Multikolineritas
DAU	,384	2,603	Tidak Multikolineritas
DAK	,439	2,275	Tidak Multikolineritas

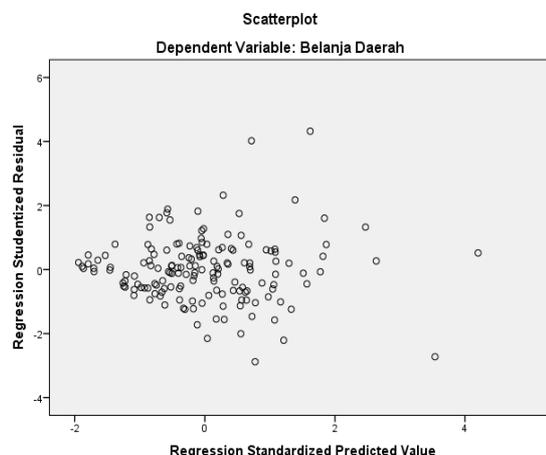
Nilai DW sebesar 1,785, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 160 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3). Nilai DW 1,312, maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.Lihat table bawahini

Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
Summary	1,785

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.Lihat table bawahini



Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat table 1. Jumlah kabupaten/kota yang menjadi sampel adalah 40 (35 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan berjumlah 5 Kabupaten/Kota di DIY) selama 4 tahun. Pendapatan Asli Daerah terendah kota Pekalongan pada tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah tertinggi kota Semarang pada tahun 2013. Dana Alokasi Umum terendah Kota Salatiga di tahun 2010. Dana Alokasi Umum tertinggi Kabupaten Cilacap di tahun 2013. Dana Alokasi Khusus terendah Kota Yogyakarta di tahun 2011, Dana Alokasi Umum tertinggi dari Kabupaten Cilacap di tahun 2013.

Tabel Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	160	38186	714027	107821,60	86437,076
DAU	160	238069	1197315	647981,50	196507,487
DAK	160	1762	118902	59750,78	21279,115
Valid N (listwise)	160				

Sumber: Data yang diolah, 2014 (dalam jutaan rupiah)

Hasil analisis dari uji t menunjukkan bahwa variabel Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja Daerah dengan nilai koefisien 1,556, artinya setiap penambahan 1% variabel PAD akan menaikkan belanja Daerah sebesar 1,556 satuan dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja Daerah dengan nilai koefisien 1,456, artinya setiap penambahan 1% variabel DAU akan menaikkan belanja Daerah sebesar 1,456 satuan dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja Daerah dengan nilai koefisien 0,585, artinya setiap penambahan 1% variabel DAK akan menaikkan belanja Daerah sebesar 0,585 satuan dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Dapat dilihat ditabel 2 bawah ini.

Tabel 2

Variabel	Koefisien β	t	Sig
Konstant	-53160,699	-2,266	,025
PAD	1,556	16,992	,000
DAU	1,456	27,016	,000
DAK	,585	1,258	,210

Sumber data diolah, 2014

Dari hasil uji F menyebutkan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah .karena diperoleh F_{hitung} sebesar 1024,589 dengan tingkat signifikansi 0,000.Dilihat table 3

Tabel3

Variabel	F	Sig	Keterangan
Regresion	1024,589	,000	Berpengaruh

Sumber: Data yang diolah,2014

koefisien korelasi antara PAD dan DAU terhadap Belanja Modal sebesar 0,976. Artinya terdapat pengaruh yang sangat kuat antara PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah, dan koefisien determinasi sebesar 0,976. Angka-angka ini berarti PAD, DAU dan DAK memberikan pengaruh terhadap Belanja Daerah sebesar 97,6% dan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihitung dalam penelitian ini.dilihatpada table 4

Tabel 4

	Korelasi (R)	Keterangan
Koefisien	,976	Berpengaruh

Sumber: Data yang diolah 2014

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam uji t menunjukkan t_{hitung} untuk PAD sebesar 16,992. Besarnya p value untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,992 dengan angka signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam uji t menunjukkan p value = 27,016, dengan angka signifikansi 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam uji t menunjukkan p value = 1,258, dengan angka signifikansi 0,210. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAK tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam uji f menunjukkan p value sebesar 1024,589 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah.

Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti hanya mengambil 3 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
2. Periode penelitian ini dibatasi hanya dari tahun 2010, 2011 sampai dengan tahun 2013.

Saran

Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. Dan mengambil sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*, Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsadi Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPF: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Isdijoso, Brahmantio, *ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL PADA ERA OTONOMIDAERAH (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*, KajianEkonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1, 2002.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi SektorPublik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Maimunah, Mutiara. (2006). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional AkuntansiIX. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan).Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Safitri, Nurul Aisyiyah. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat*

Daerah (SKPD) Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.

Singgih, Santoso. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sekaran, Uman, *Research Method for Business : A skill Building Approach*, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002.

Sukriy dan Halim Abdullah (c), *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Triwidodo, Pambudi. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

_____ . Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 *tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

<http://www.bpkp.go.id>

<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050879/jurnalakuntansipemerintah>

Realisasi APBD Tahun 2007-2009 Total Se-provinsi Jawa Tengah dan DIY

www.djpk.depkeu.go.id